



**Tabayyun : Journal Of Islamic Studies**

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

# **HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DAN AMIEN RAIS**

**Dewi Kentri Saragih<sup>1</sup>, Delviani Damanik<sup>2</sup>, Mutiara  
Hati<sup>3</sup>, Firly Naszuwa Damanik<sup>4</sup>, Shofia Riani<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>12345</sup>

**Email :** dewikentri29@gmail.com<sup>1</sup>, anidelvi160@gmail.com<sup>2</sup>,  
mutia.tia0113@gmail.com<sup>3</sup>, firlynaszuwa29@gmail.com<sup>4</sup>,  
shofiariani4@gmail.com<sup>5</sup>

**Abstract :** The thoughts of Abdurrahman Wahid and Amien Rais, two influential figures in Indonesian political and religious history. Abdurrahman Wahid, known as Gus Dur, advocates inclusive and pluralist views, supporting a secular state that is neutral towards religion and promoting religious freedom and tolerance in a diverse society. On the other hand, Amien Rais supports the integration of Islamic values in government systems and public policies to achieve social justice and morality. This study explores the differences in approaches of the two figures in interpreting the role of Islam in state governance and its impact on democracy and social harmony in Indonesia. Through this comparative analysis, this research aims to provide a deeper understanding of the dynamics of the relationship between Islam and the state in the Indonesian context, as well as its

**Keywords:** Abdurrahman Wahid, Amien Rais, State, Religion, Islam

## **Pendahuluan**

Gagasan tentang hubungan Islam dan negara selalu menjadi kontroversi di Indonesia, namun telah dibahas selama beberapa tahun dan masih menjadi perdebatan sengit di kalangan politik Indonesia hingga saat ini. Ketegangan dan perdebatan seperti ini hampir pasti akan

muncul menjelang pemilu. Sebab momen ini merupakan kesempatan emas bagi semua kalangan yang ingin memperjuangkan ambisi politiknya, baik yang bersifat nasionalis maupun yang berideologi Islam.<sup>1</sup>

Sejak Pancasila dideklarasikan oleh Sukarno pada tahun 1945 sebagai landasan ideologi resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila telah menjadi bagian perdebatan politik yang tak terhindarkan di kalangan politisi dan pemuka agama, khususnya umat Islam.<sup>2</sup> Sejak tahun 1978 hingga 1985, ideologi Pancasila yang dirumuskan oleh Soeharto tetap bertahan dan memicu perdebatan luar biasa di kalangan pemikir dan gerakan Islam pada masa itu. Peristiwa politik serupa terjadi lagi di Indonesia pada tahun 1990 dalam konteks perdebatan ideologis. Alasan sebenarnya dari perdebatan ini adalah masih belum adanya konsensus mengenai hubungan antara Islam dan negara.<sup>3</sup>

Segi hukum Islam yang dikenal dengan fiqh siyasah membahas tentang bagaimana mengatur kehidupan manusia dalam suatu negara untuk kebaikan semua orang, tidak tergantung pada masa pemerintahan setelah Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang secara khusus memerintahkan atau mengamanatkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an tidak pernah sekalipun menyebut kata "negara" (Daulah), namun mengandung komponen fundamental bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>4</sup>

Beberapa prinsip pokoknya antara lain: Musyawarah, Keadilan, Persamaan<sup>5</sup>. Mayoritas akademisi dan profesional syariah di bidang hukum ketatanegaraan menganggap "musyawarah" sebagai konsep dasar konstitusi dan persyaratan Islam, menggantikan prinsip-prinsip luas dan landasan standar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis para Nabi. Perlunya hukum dalam urusan kenegaraan untuk mengendalikan dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat<sup>6</sup>. Manusia akan menjadi tidak terorganisir dan tidak memiliki tujuan tanpa hukum, dan kejahatan akan merajalela. Oleh karena itu, kebutuhan hukum dalam situasi ini sangat penting bagi berfungsinya masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam hal ini, Islam berpendapat bahwa tujuan

<sup>1</sup> Ariel Heryanto, "Budaya populer di Indonesia," Yogyakarta: *jalasutra*, 2012.

<sup>2</sup> Douglas E. Ramage, "Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi", alih bahasa Hartono Hadikusumo, (Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002), 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>4</sup> Muhajir, K. H. A. (2017). *Fiqh Tata Negara*. IRCiSoD.

<sup>5</sup> Muhajir, K. H. A. (2017). *Fiqh Tata Negara*. IRCiSoD.

<sup>6</sup> Nubowo, A. (2015). *Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi*.

pembentukan negara dan pembuatan undang-undang adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, anak-anak, dan harta benda, selain terikat pada kepentingan global.<sup>7</sup>

Beberapa prinsip pokoknya antara lain: Musyawarah, Keadilan, Persamaan<sup>8</sup>. Mayoritas akademisi dan profesional syariah di bidang hukum ketatanegaraan menganggap "musyawarah" sebagai konsep dasar konstitusi dan persyaratan Islam, menggantikan prinsip-prinsip luas dan landasan standar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis para Nabi. Perlunya hukum dalam urusan kenegaraan untuk mengendalikan dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat<sup>9</sup>. Manusia akan menjadi tidak terorganisir dan tidak memiliki tujuan tanpa hukum, dan kejahatan akan merajalela. Oleh karena itu, kebutuhan hukum dalam situasi ini sangat penting bagi berfungsinya masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam hal ini, Islam berpendapat bahwa tujuan pembentukan negara dan pembuatan undang-undang adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal, anak-anak, dan harta benda, selain terikat pada kepentingan global.<sup>10</sup>

Pemikiran gus dur tentang Islam sebagai agama dapat ditelusuri konsepsinya pada seorang tokoh intelektual Muslim asal Sudan, Mahmoud Mohamed Taha. Dalam pandangannya, Islam adalah suatu proses intelektual dimana seorang hamba berproses dalam penghambaan di suatu jenjang yang terdiri dari tujuh tahapan, yaitu: al-islam, al-iman, al-ihsan, 'ilm al-yaqin, 'ilm 'ain al-yaqin, 'ilm haqq al-yaqin, dan al-islam. Islam pada tahap awal, hanyalah kepatuhan eksternal yang berurusan dengan ucapan dan tindakan. Sedangkan Islam pada tahap akhir merupakan kepatuhan eksternal dan internal (sejati) sekaligus, dan merupakan penyerahan dan kepatuhan intelegensia (dengan pengetahuan), serta penerimaan atas Allah baik secara pribadi maupun umum. Islam yang dimaksudkan Wahid di sini, adalah islam pada tahap akhir.<sup>11</sup>

Kemudian pemikiran Amien Rais dalam kancah perpolitikan nasional menarik untuk dicermati lebih dalam. Hal ini berkaitan dengan sejarah panjang Amien Rais dalam perkembangan demokrasi yang hadir, khususnya di era reformasi. Hal ini menjadi bagian dari

<sup>7</sup> Romadlan, S. (2020). Diskursus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah

<sup>8</sup> Muhajir, K. H. A. (2017). Fiqh Tata Negara. IRCiSoD.

<sup>9</sup> Nubowo, A. (2015). Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi.

<sup>10</sup> Romadlan, S. (2020). Diskursus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah

<sup>11</sup> Zainal Abidin, "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Pluralitas," *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 373, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3332>.

perkembangan sejarah panjang bangsa yang di era Orde Baru mendapat begitu banyak tantangan. Amien Rais, dipandang sebagai salah satu pemimpin reformasi, memulai perdebatan penting tentang suksesi presiden pada sidang Tanwir Muhammadiyah ke-73 tahun 1993 di Surabaya.

Hubungan antara negara dan agama telah menjelma menjadi perdebatan yang melelahkan dan panjang tentang apakah negara harus terlibat dalam persoalan agama.<sup>12</sup> Persoalan ini yang menjadi inti perdebatan mengenai sekularisasi. Relasi antara agama dan Negara juga menunjukkan derajat otonomi dan pengakuan agama sebagai hak asasi individu, yang perhatiannya diserahkan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bebas dan otonom. Terlebih lagi saat ini dimana Islamisasi sudah mulai menghiasi berbagai sektor, menstimulus inovasi dalam praktek sosial hingga mengembangkan lembaga-lembaga otonom dalam pengawasannya (Afifi, Abbas, & Ismail, 2019).

Untuk itu jurnal ini mengkaji pemikiran dua tokoh besar bangsa Indonesia, mengenai hubungan islam dan Negara khususnya di kalangan kaum muslim, yaitu Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur dan Amien Rais.

## Pembahasan dan Diskusi

### A. Pengertian Hubungan Islam Dan Negara

Para ahli terus memperdebatkan topik terkait negara dan agama. Kaitan islam yang agak sulit antara agama (din) dan Negara (daulah), dimana agama dan negara saling bergantung menjadi inspirasi ketegangan perdebatan mengenai hubungan agama dan negara. Keduanya merupakan institusi politik dan agama pada saat yang bersamaan.<sup>13</sup>

Sejak konsep negara bangsa muncul pada abad ke-19 dan dipopulerkan secara global oleh negara-negara Barat, termasuk wilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pembahasan mengenai hubungan Islam dan negara banyak dibicarakan oleh para ahli di dunia Islam. Meskipun gagasan tentang negara bangsa telah ada sejak awal abad ke-19, pertanyaan tentang Islam dan negara baru secara

---

<sup>12</sup> Heri Firmansyah dan Nur Fatimah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 1, no. 02 (2023), <https://journal.tabayun.com/index.php/tabayyun/article/view/19>.

<sup>13</sup> Mannan, A. (2014). "Islam Dan Negara"

umum telah mendapat perhatian internasional. Hal ini mencakup negara-negara seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, khususnya pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua.

Islam dan negara telah menjadi topik perdebatan hangat sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan memperoleh pengakuan internasional baik secara *de jure* maupun *de facto*. Namun secara historis, hal itu dimulai sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, hubungan antara wacana Islam dan negara secara resmi dibahas dalam berbagai lingkungan, termasuk organisasi kecil dan menengah, lembaga tinggi negara, partai politik, serta lembaga legislatif dan eksekutif. selain pengadilan<sup>14</sup> Mengingat perjuangan pasca kemerdekaan antara Islam dan negara, maka relevan untuk mengkaji tren pemikiran politik Islam. Beberapa kalangan menafsirkan hal ini sebagai sikap moderat yang dianut umat Islam Indonesia pada periode tersebut. Oleh karena itu, banyak orang menganggap lahirnya Piagam Jakarta tahun 1945 sebagai sebuah “keberhasilan” bagi para pemimpin Islam dalam memperkenalkan Pancasila, ideologi dasar negara. Lebih jelasnya, sejumlah besar orang juga memandang penghapusan sembilan kata dari sila pertama Pancasila—“ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam untuk kepentingannya sendiri”—sebagai “kegagalan” para ulama atau ulama Islam. tokoh-tokoh pergerakan dalam rumusan akhir para pengikut Piagam Jakarta,” yang akhirnya disingkat menjadi empat kata: gagasan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hal ini merupakan hasil dari berbagai perbincangan dan perdebatan yang berlarut-larut, penuh gejolak, dan melelahkan di kalangan umat Islam Indonesia mengenai topik “hubungan antara Islam dan negara” yang terjadi setelah kemerdekaan, dan lain-lain. Setelah pemilihan umum tahun 1955, konsep negara Islam mulai terbentuk. Saat itu, demokrasi parlementer telah terbentuk sejak tahun 1950-an, dan Mohammad Natsir merupakan perancang utama Konstitusi baru yang ditugaskan di Dewan Konstituante. Situasi ini masuk akal mengingat gerakan Islam Indonesia diperkenalkan dengan konsep-konsep negara yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam pada tahun 1950-an<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Hasan, H. (2015). “HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA”: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia.

<sup>15</sup> Hasan, H. (2015). Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia.

Para cendekiawan dan negarawan—terutama intelektual Muslim—sangat memperhatikan perdebatan tentang Islam dan negara. Banyak intelektual Indonesia juga berpartisipasi dalam diskusi mengenai hubungan antara Islam dan negara, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Salah satu intelektual Indonesia tersebut adalah Ahmad Syafii Maarif yang berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang adil dan sejahtera karena menganut moral Islam. Islam dan negara saling bergantung atau mempunyai hubungan simbiosis. Islam adalah agama yang membutuhkan negara, dan negara membutuhkan Islam. Islam tidak perlu menjadi dasar negara Indonesia; Sebaliknya, azas Islam sendiri harus dijadikan sebagai kerangka penyelenggaraan negara agar Pancasila yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam benar-benar mampu menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang sukses dan berkeadilan. Terlebih lagi, wacana Indonesia tentang Islam dan negara masih berkembang pesat hingga saat ini. Tidak mungkin memisahkan evolusi ini dari wacana yang berkembang di seluruh dunia Islam, khususnya yang muncul pada abad ke-18, 19, dan 20 di Timur Tengah, Afrika, India, dan Pakistan<sup>16</sup>.

## **B. Pemikiran Para Tokoh Muslim Terkait Hubungan Islam Dan Negara**

### **a. Pemikiran Amien Rais**

#### **1. Biografi Amien Rais**

Amien Rais lahir di Solo pada tanggal 26 April 1944 M dengan nama depan Mohammad Amien. Ia dilahirkan dalam keluarga dengan tradisi Islam dan Muhammadiyah yang sangat kental. Amien Rais mengenyam pendidikan awal di sini, bersama kakak perempuannya Siti Fatimah dan adik laki-laknya Abdul Rozak, Siti Aisha, Ahmad Dahlan dan Siti Asiyah, dalam keluarga yang taat dan shaleh. Ayahnya, Shufud Rais, adalah seorang aktivis yang mengenyam pendidikan di Seminari Muallimin Muhammadiyah, sekolah kader Muhammadiyah tertua dan ternama di Yogyakarta. Shufud Rais tidak datang dari latar belakang solo. Ia lahir dan besar di Purbalinga, Jawa Tengah.

Ibunda Amien Rais, Sudarmiya, juga seorang aktivis perempuan muslim yang berlatar belakang kuat di Muhammadiyah, sama seperti ayahnya. Amien Rais sejak dini mendapat perhatian besar

---

<sup>16</sup> Marlena, L. (2018). Hubungan islam dan negara dalam pandangan ahmad syafii maarif. *Manthiq*, 3(2), 21–40.

dari keluarganya di bidang agama dan Kemuhammadiyah. Hal ini terlihat dari sejarah pendidikan Amien yang tidak pernah lepas dari sekolah agama dan muhammadiyah. Beliau menyelesaikan pendidikannya mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Solo. Amien Rais juga merupakan anggota organisasi pramuka Muhammadiyah, Hizbul Wasan, sejak kecil. Selain bersekolah, Amien Rais juga bersekolah di pesantren tradisional.<sup>17</sup>

Amiens Rais tentu dianggap sebagai anak pemberani. Hal ini bukan hanya sekedar ciri kepribadian saja, namun juga merupakan hasil didikan orang tuanya. Sejak dini, ibu Amiens Rais mendidiknya untuk menjadi pribadi yang bumi dan berani mengatakan kebenaran. "Ibu saya yang mengajari saya menjadi Amal Ma'ruf. Menurutnya, tidak ada resiko dalam mengenalkan Amal Ma'ruf. Mereka yang tidak setuju tidak marah. "Tetapi jika Anda tidak melakukan kesalahan apa pun, ada banyak risiko yang terlibat," kata Amien Rais.

## 2. Pemikiran Amien Rais Tentang Hubungan Agama dan Negara

Dalam kehidupan dan pemikiran masyarakat sehari-hari, politik dan Negara seringkali dipandang sebagai konsep yang berbeda. Yang lain mempunyai persepsi bahwa politik biasanya melibatkan penipuan, ambisi, pengkhianatan, penipuan, dan sifat-sifat negatif lainnya. Oleh karena itu, tampaknya tidak ada kesinambungan organik atau fungsional antara politik dan agama. Pak Amian Rais menilai hal ini berbahaya bagi Indonesia dari sudut pandang agama dan politik serta merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Pendekatan Amiens Rais terhadap hubungan agama dan negara didasarkan pada pandangan intelektualnya terhadap fundamental Islam, yaitu Aqidah, Syariah, dan agama sebagai fakta yang timbul dari gambaran dan sejarahnya.

Menurut Amien Rais, ada dua jenis tauhid, yakni tauhid sosial dan tauhid akida (tauhidullah). Arti "Aqidah Tauhid" mengacu pada tiga jenis Tauhid: Urhya, Rubbiya, dan Asma. Inilah Shifat yang harus disadari oleh Ushuruddin. Sedangkan

---

<sup>17</sup> Bagus Hakim dan Nurhuda Kurniawan, Amien Rais, *Inilah jalan Hidup Saya*, (Yogyakarta, Pt. Bintang Pustaka Abadi(BIPA) : 2010), h. VI.

aspek sosial dari aqidah tauhid disebut tauhid sosial. Ide di balik tauhid sosial adalah bahwa tauhid yang merasuki pikiran dan jiwa manusia setiap umat Islam diwujudkan dalam interaksi sosial sehari-hari dan mempengaruhi perilaku serta pemikiran bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Membangun bangsa yang setara, sadar dan beradab adalah tujuan dari pemahaman sosial budaya tauhid. Ide monoteisme sosial adalah bahwa Tuhan membangun masyarakat yang adil di mana manusia mendapatkan kepuasan dalam usahanya. Menurut tafsir Amien Rais tentang hubungan agama dan negara, monoteisme sosial menunjukkan betapa hati, jiwa, dan semangat umat Islam terpusat pada konsep ini, dan berdampak positif terhadap perkembangan akal manusia. Akibatnya, monoteisme sosial, yang tercermin dalam tindakan masyarakat dan pemerintah, menjadi pusat, esensi, dan substansi seluruh doktrin Islam. Kata "Syariah" memiliki arti khusus dalam iman Islam dan digunakan untuk mewakili tatanan tertinggi Islam.<sup>18</sup>

Ruang lingkupnya mencakup pengaturan mengenai urusan kenegaraan, kesusilaan, dan perlakuan yang secara keseluruhan sangat bergantung pada kesadaran manusia. Menurut Amien Rais, Syariah adalah suatu sistem hukum komprehensif yang dapat menjadi landasan hukum Islam sehingga umat Islam dapat mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Islam adalah agama yang agung. Syariah itu mengatur setiap aspek keberadaan manusia. Islam juga merupakan budaya dan peradaban yang mandiri. Pada hakikatnya hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan wujud jiwa manusia seutuhnya dan bukan sekedar persoalan akal, emosi, dan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mempunyai unsur sosial dan sejarah serta unsur spiritual. Soal interaksi agama dan negara, Amien Rais mendasarkan argumentasinya pada gagasan tauhid. Menurut Amien Rais, semangat pembebasan dan transformasi yang mengakar kuat dalam wacana monoteistik menunjukkan bahwa Islam sejak awal

---

<sup>18</sup> Marfirozi, M. (n.d.). Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.

<sup>19</sup> Nadliroh, T. A. (2022). Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 145–154.



berdirinya memiliki karakter revolusioner. Lebih lanjut, menurut Amien Rais politik dan moralitas agama harus memiliki keterkaitan yang erat. Jika moralitas agama dapat diterapkan dengan baik dan efektif, maka akan menimbulkan opini positif terhadap kebijakan yang ada.

## **b. Pemikiran Abdurrahman Wahid**

### **1. Biografi Abdurrahman Wahid**

Abdurrahman Wahid atau yang populer dengan sebutan Gus Dur, lahir pada tanggal 4 Sya`aban, tepatnya 7 September 1940, di Denanyar, Jombang. Saat lahir, ia diberi nama Abdulrahman ad Dakhil bin Wahid Hasyim bin Hasyim Asiari.<sup>20</sup> Namun ada yang istimewa di hari ulang tahun Gus Dur banyak yang percaya Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus. Hari lahir Gus Dur dirayakan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2000 di Istana Bogor. Sebab saat itu, kakak dan sahabatnya sedang hadir dan ulang tahunnya dirayakan di Istana Bogor. Perayaan seperti halnya kehidupan Gus Mayor, banyak hal yang berbeda dari anggapan umum. Namun perlu diketahui bahwa tanggal tersebut berdasarkan penanggalan Hijriah dan Gus Dur lahir pada bulan Syaaban, bulan kedelapan penanggalan Hijriah.

Gus Dur lahir di Pondok Pesantren kakek dari pihak ibu, Kiai Bisri Shansri,<sup>21</sup> Gus Dur juga merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan bapak dan ibu Wahid Hasyim KH dan ibundanya Hiji Soricha, serta merupakan keturunan dari Kiai Bisri Shansuri dan Kiai Hasyim Asiari. Kedua kakek Gus Dur merupakan orang yang sangat disegani. Sementara itu, Hashim Asiari KH, khususnya putranya Wahid Hashim KH, menjabat sebagai Menteri Agama pada masa Sukarno dan juga menikmati pamor kelas menengah perkotaan. Hal ini mendekatkan mereka dengan gerakan nasionalis revolusioner yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda setelah Perang Dunia II.

Kakek Gus Dur adalah kakek dari pihak ayah, Kiai Hashim Ashari, yang lahir di Jombang pada bulan Februari 1871 dan

---

<sup>20</sup> Ahmad Muzakki, *Gus Dur: pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia* Abad 21, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), 31.

<sup>21</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 26.

meninggal di Jombang pada bulan Juli 1947. Kiai Hasyim Asyari berperan penting dalam berdirinya NU sekitar tahun 1926 kiai Hashim Ashari sangat dihormati sebagai pemimpin Islam di komunitas pedesaan tradisional. Selain itu beliau juga dikenal sebagai guru yang sangat baik, inspiratif dan terpelajar, tapi dia juga seorang nasionalis yang gigih. Di antara teman-temannya adalah tokoh , yang memainkan peran penting dalam gerakan nasionalis sebelum perang.

Keluarga Hasyim Asy'ari KH sangat bangga karena beliau merupakan keturunan Raja Brawijaya VI yang memerintah Pulau Jawa pada tahun 1994.<sup>22</sup> Setelah konflik pada pemerintah Belanda berakhir pada tahun 1949,<sup>23</sup> dengan kata lain Gus Dur sejak kecil sudah mendapatkan pengalaman tentang dunia politik melalui keluarganya serta lingkungan yang memberikan contoh terhadap apa yang dia lihat tidak hanya dari orang tuanya akan tetapi Ayahnya diangkat menjadi menteri agama pertama, dan keluarga Wahid pindah ke Jakarta. Dengan demikian, situasi baru pun tercipta tamu ini termasuk berbagai tokoh profesional yang mulai tinggal di rumah kakek mereka pada tahun dan tinggal sampai ayah mereka menjadi menteri agama pada tahun tapi juga melalui keluarganya dan perjalanan hidupnya.

## 2. Pemikiran Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Secara umum cara berpikir Gus Dur tentang Islam dan negara dapat tergolong sekuler, yaitu dengan memisahkan agama dan negara, sesuai dengan cara berpikir Ali Abd al-Raziq. Gus Dur tidak menerima Islam sebagai ideologi karena menurutnya ideologisasi politik, agama, dan budaya justru akan memutarbalikkan tujuan dan berujung pada disintegrasi berbasis sekretariat dan konflik horizontal, bukannya memperbaiki struktur.. Menurut pendapatnya, ia menentang pembentukan negara Islam karena dua alasan. Pertama, argumen normatif-teologis yang menyatakan bahwa Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan Negara Islam (Daulah Islamiyyah). Kedua,

---

<sup>22</sup> Greg Barton, Biografi Gus Dur, *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, 26-27.

<sup>23</sup> Agus Mahfud, *Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur*, (Nadi Pustaka: Yogyakarta, 2012), 112.

argumen historis yang terkait dengan fakta bahwa sepanjang sejarah Islam tidak pernah ada bukti mengenai rencana suksesi formal dalam Islam. Hal ini terlihat dari proses pengangkatan empat khalifah pertama setelah wafatnya Nabi, padahal pencalonan kepala negara merupakan sarana utama dalam memahami aparatur negara<sup>24</sup>. Terkait hubungan agama dan negara, kaum nasionalis dan umat Islam selalu berselisih sejak Indonesia merdeka. Dalam upaya meredakan ketegangan tersebut, Gus Dur dalam sosok K.H. Achmad Siddiq menegaskan, meski Islam sebagai agama menjunjung tinggi prinsip-prinsip normatif baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat, namun negara tidak mampu menjunjung tinggi cita-cita yang tidak disetujui oleh pemeluk agama dan pandangan dunia lain. Gus Dur lebih sering menggunakan ideologi Pancasila daripada Islam untuk membenarkan keterlibatannya dalam debat politik dan artikulasi keyakinan dasar politiknya untuk menegakkan tujuan demokrasi dan sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa visi politik yang demokratis, sekuler, dan nasionalis menjadi landasan ideologi politiknya<sup>25</sup>.

Bagi Gus Dur Pancasila adalah ideologi nasional yang esensial untuk mempertahankan kesatuan nasional. Pandangan ini menurutnya penting untuk disampaikan karena beberapa muslim memandang Pancasila sebagai ideologi sekuler yang tidak sesuai dengan Islam. Ia kemudian menunjukkan bahwa ayahnya, Wahid Hasyim, seorang pemimpin NU pada tahun 1945 juga sepakat mendukung sebuah negara nasional non Islam. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Gus Dur memiliki beberapa hal pemikiran mengenai hubungan antara islam dan negara, yaitu Gus Dur memperjuangkan independensi keberagamaan, menolak Islam sebagai ideologi negara, dan menekankan tidak adanya intervensi negara dalam urusan agama serta sebaliknya.

### C. Negara Pancasila Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Umat Islam harus berupaya untuk menyoroti cita-cita hukum yang

---

<sup>24</sup> Muid, M. H., Kusmanto, H., & Fauzan, I. (2023). Perbandingan Konsep Negara Islam: Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan KH. Abdurrahman Wahid. *PERSPEKTIF*, 12(1), 196–211.

<sup>25</sup> Saoki, S. (2014). Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(02), 344–367.

termasuk dalam syariah untuk menemukan formulasi yang paling mungkin untuk memasukkan nilai-nilai ini ke dalam operasional bangsa dan negara sehari-hari, mengingat syariah tidak menawarkan pedoman konvensional untuk sistem politik. atau pemerintah. Keberadaan penduduk, keberadaan wilayah, dan keberadaan pemerintahan yang berdaulat merupakan tiga komponen dasar suatu negara. Kekompakan sosial bukanlah satu-satunya landasan makna negara. Apalagi didasarkan pada pemikiran bahwa manusia berperan sebagai khalifah Tuhan, menjalankan kekuasaan dan keimanan-Nya. Agar manusia bisa sejahtera dalam kehidupan ini, maka mereka harus mengikuti petunjuk-Nya. Umat Islam harus berupaya menonjolkan cita-cita hukum yang terkandung dalam syariat guna menemukan rumusan yang paling mungkin untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam operasional berbangsa dan bernegara sehari-hari, mengingat Syariat tidak menawarkan pedoman konvensional untuk sistem politik atau pemerintahan.<sup>26</sup>

Keberadaan penduduk, keberadaan wilayah, dan keberadaan pemerintahan yang berdaulat merupakan tiga komponen dasar suatu negara. Kekompakan sosial bukanlah satu-satunya landasan makna negara. Apalagi didasarkan pada pemikiran bahwa manusia berperan sebagai khalifah Tuhan, menjalankan kekuasaan dan keimanan-Nya. Agar manusia sejahtera dalam kehidupan ini, maka harus mengikuti petunjuk-Nya<sup>27</sup>. Dalam hal mengkategorikan negara, Ibnu Khaldun mempunyai sistemnya sendiri. Ia membedakan dua kategori gaya negara: negara yang memiliki kekuatan alam, atau *mulk tabi'i* (negara tradisional), dan negara yang memiliki kekuatan politik, atau *mulk siyasi* (negara modern), yang dibagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu *siyasah diniyah*, *siyasah aqliyah*, dan *siyasah madaiyah*. suatu bangsa yang dibedakan berdasarkan kekuatan bawaannya (*mulk tabi'i*) atau sebagai negara tradisional. "Hukum Rimba" dan pemerintahan yang sewenang-wenang dan otokratis (*despotisme*) merupakan ciri-ciri tipe negara alamiah. Kekuatan dan keunggulan sangat penting dalam situasi ini.<sup>28</sup> Kelas penguasa bebas melakukan dosa dan amoralitas sesuka mereka, dan hukum hanya digunakan untuk membelenggu leher mereka yang ditundukkan. Prinsip-prinsip keadilan diabaikan. keadilan sosial-politik

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis, *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan*, News.Ge (Gramedia Pustaka Utama, 20189).

<sup>27</sup> Baidhawiy, Z. (2015). *Negara Pancasila Negara Syariah*. MAARIF: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, 1

<sup>28</sup> Otto Gusti Madung, "Filsafat Politik Negara dalam Bentangan Diskur-sus Filosofis," *Penerbit Ledalero* (Penerbit Ledalero, 2013).

dan keadilan ekonomi. Keadaan alam seperti inilah yang disebutnya sebagai tidak beradab. negara modern atau bangsa yang dibedakan berdasarkan kekuatan politik (mulk siyasi). Berdasarkan otoritas politik, ia mengklasifikasikan pemerintahan modern ke dalam tiga kategori: pemerintahan dengan nomokrasi Islam (siyasah diniyah) atau supremasi hukum.

Siyasah diniyah adalah negara hukum dalam pengertian tradisional, artinya didasarkan pada Syariah atau hukum Islam. Menurut Thaher Azhary, Malcolm H. Kerr menyebutnya sebagai Nomokrasi Islam. Ibnu Khaldun menggambarkan Siyasah Diniyah atau Negara Hukum Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah di samping akal manusia, yang juga relevan dan berperan dalam urusan pemerintahan. Ijma' ulama dan qiyas mengacu pada akal manusia. agar negara Islam, atau nomokrasi, menjadi Negara Ulama. Negara hukum sekuler (siyasah 'aqliyah). Siyasah aqliyah, atau negara yang dibangun semata-mata berdasarkan akal manusia tanpa memperhatikan hukum yang bersumber dari wahyu, merupakan jenis negara yang lazim dijumpai di negara-negara demokrasi Barat di Eropa dan Amerika. Negara "Republik" (siyasah madaniyah) karya Plato. Sejumlah kecil kelompok elit menguasai sebagian besar kelompok budak di Siyasa Madaniyah, yang tidak diberi hak untuk memilih. Farabi membedakan enam kategori pemikiran politik Islam sepanjang Era Klasik, yaitu sebagai berikut: Al-Madinah Al-Fadilah, atau Negara Bahagia, adalah negara utama.

Bangsa primer, disebut juga bangsa bahagia, diibaratkan sebagai tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang setiap organ dan bagiannya menjalankan fungsinya masing-masing untuk menjamin keutuhan dan pemeliharaan tubuh. Al-Farabi menegaskan bahwa, warga suatu negara terdiri dari berbagai keterampilan dan bakat. Sudut pandang Plato menyimpang dari penilaian Farabi. Terus terang, Plato memerlukan kepalsuan besar, atau "kebohongan besar", dalam teorinya untuk memperkuat posisinya. Prinsip utama kebohongan ini adalah bahwa Tuhan membentuk tiga jenis manusia yang berbeda: jenis manusia terbaik terbuat dari emas, jenis kedua terbuat dari perak, dan jenis ketiga terbuat dari besi dan kuningan. Negara yang bodoh adalah kebalikan dari negara yang pintar; warganya tidak menyadari kebahagiaan dan tidak membayangkannya; mereka tidak akan mengikuti instruksi atau memercayai apa yang diperintahkan<sup>29</sup>.

Sebuah bangsa yang filosofinya salah arah atau tidak adanya

---

<sup>29</sup> Utari, D. F. (2017). Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila. UIN Raden Intan Lampung

tujuan akhir, tidak mendukung kesejahteraan material dan spiritual.<sup>30</sup> anal Bangsa yang hancur adalah bangsa yang masyarakatnya, sama seperti bangsa utama, mengetahui apa itu kebahagiaan, namun berperilaku dan hidup seolah-olah berada di bangsa yang bodoh. Perbedaan yang tajam antara perkataan dan perbuatan warga negara yang korup ini mencerminkan watak dan perilaku yang sama dengan orang-orang jahil. Meskipun demikian, dalam hal pemahaman mereka tentang Tuhan, kebahagiaan, dan akal, warga negara ini sebanding dengan warga negara utama.

Negara yang mengalami kemunduran adalah negara yang masyarakatnya menganut keyakinan dan cara hidup yang sama dengan mayoritas sebelum memulai jalan hidup yang berbeda dan tidak lagi layak mendapat pujian mengingat meluasnya korupsi dan serangan terhadap keadilan dan kebenaran di negara ini. Suatu bangsa yang warganya mengingkari kehadiran Tuhan dan penuh dengan kesalahan, ketidakjujuran, dan kesombongan disebut sesat. Sebaliknya, kepala negara menyesatkan masyarakat dengan mengatakan bahwa dia mendapat wahyu dari Tuhan dan mereka harus mengikuti petunjuknya. Seorang kepala negara menipu masyarakat di suatu negara dengan perkataan dan perbuatan ketika masyarakat mengira ada masalah dengan Tuhan namun dia tetap merasa telah mendapat wahyu dari Yang Maha Kuasa. Bangsa-bangsa yang warga negaranya dan unsur-unsur rumput jahatnya diakui sebagai bangsa-bangsa yang warga negaranya mempunyai kemampuan untuk mengganggu keseimbangan kehidupan pada hakikatnya adalah bangsa-bangsa yang tidak memiliki dasar budaya, berkepribadian eksentrik, dan buruk moralnya.

#### **D. Prinsip-Prinsip Bernegara Menurut Fiqih Siyash**

Konsepsi keadilan nomokrasi Islam mencakup gagasan yang sangat tinggi yang berbeda dengan keadilan sebagaimana dipahami manusia. Namun, gagasan nomokrasi Islam menempatkan masyarakat pada posisi yang wajar bagi mereka sebagai komunitas dan sebagai individu.<sup>31</sup> Menurut Al-Qur'an, *hablun min Allah wa hablun min al-as*, manusia bukanlah pusat alam semesta; sebaliknya, mereka hanyalah

---

<sup>30</sup> Musryid Al Fadhil, "Analisis Konsep Triple Helix Dalam Mendorong Pengembangan Industri Kreatif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>31</sup> M.H Dr. H. Boy Nurdin, S.H., *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2012).

hamba Allah, dan nilai-nilai mereka ditentukan oleh hubungan mereka dengan Allah dan orang lain. Kekuatan sebagai prinsip kepercayaan. Kekuasaan adalah suatu kepercayaan, dan kepercayaan perlu diberikan kepada pemilik yang sah agar kepercayaan tersebut dapat ditegakkan, dilaksanakan, atau dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan dasar-dasar nomokrasi dalam Islam. Yang dimaksud dengan amanah dalam hal ini adalah jabatan-jabatan seperti Bupati, Walikota, Menteri, atau Presiden yang pada hakekatnya adalah pemegang amanah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai anugerah-Nya. Kepercayaan mencakup tugas-tugas yang diberikan oleh rakyat kepada para pemimpinnya, yang harus mereka lakukan dengan terampil dan tanpa bias.

### E. Prinsip Musyawarah.

Fondasi negara Islam didasarkan pada kontemplasi yang diamanatkan oleh Al-Qur'an. Dalam hal ini, musyawarah mengacu pada hak masyarakat untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik dan hukum, termasuk hak untuk memilih wakil dan memantau jalannya pemerintahan sejalan dengan asas amar ma'ruf nahi munkar yang mengharuskan pemerintah membuat undang-undang.<sup>32</sup> Undang mereka berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Al-Qur'an dan Sunnah secara umum tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya bergantung pada manusia untuk mengontrol dan memutuskannya. Saat itu, diskusi dilakukan di dalam masjid karena berfungsi sebagai pusat segala acara keagamaan dan sosial. Empat khalifah penerus Nabi—Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali—melakukan praktik ini. Prinsip kesetaraan. Menurut perspektif Islam, tinggi badan seseorang tidak didasarkan pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, kebangsaan, atau garis keturunan, yang memiliki unsur realistis. Setiap orang dalam Islam mempunyai kesempatan yang sama karena kesalehan diukur dari kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik, yang bermanfaat bagi umat manusia. Ketakwaan merupakan kualitas dan tinggi derajat seseorang. Surat An-An'am ayat 165 dan surat Al-Baqarah ayat 30 pada hakikatnya memberikan alasan yang sangat jelas agar laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam politik.

---

<sup>32</sup> A Nur Rohmah, O M Hasim Harahap, dan T Agustian, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa ...)" (IAIN CURUP, 2022).

## Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais mengenai hubungan Islam dan negara mencerminkan dua pendekatan yang berbeda namun sama-sama signifikan dalam konteks Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan pentingnya negara sekuler yang netral terhadap agama, mendukung pluralisme, dan mempromosikan kebebasan beragama. Pandangannya mencerminkan upaya untuk menjaga keragaman budaya dan agama Indonesia dalam kerangka demokrasi yang inklusif.

Sebaliknya, Amien Rais mengusulkan integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dan tata kelola negara. Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip Islam dapat membantu menciptakan keadilan sosial dan moralitas publik. Pendekatan ini menekankan peran agama sebagai sumber etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan ketegangan yang terus ada dalam politik Indonesia antara keinginan untuk menjaga identitas keagamaan dan kebutuhan untuk membangun sebuah negara yang inklusif dan demokratis. Studi ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan kompromi dalam menangani hubungan kompleks antara agama dan negara, serta bagaimana pendekatan yang berbeda dapat saling melengkapi dalam memperkuat kohesi sosial dan stabilitas politik di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran kedua tokoh ini, dapat diambil pelajaran penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan toleran dalam konteks masyarakat pluralistik.



## Daftar Pustaka

- Al-Farisi, L. S. (2020). *Politik identitas: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila*
- Baidhaw, Z. (2015). *Negara Pancasila Negara Syariah*. MAARIF: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, vol. 1.
- George McTurnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Surakarta dan Jakarta: UNS Press kerja sama dengan Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Hasan, H. (2015). *Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Marfirozi, M. (n.d.). *Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Dan Amien Rais Tentang Hubungan Islam Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Marlena, L. (2018). *Hubungan Islam Dan Negara Dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif*. *Manthiq*, 3(2).
- Muid, M. H., Kusmanto, H., & Fauzan, I. (2023). *Perbandingan Konsep Negara Islam: Analisis*
- Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan KH. Abdurahman Wahid*. *PERSPEKTIF*, 12(1).
- Nadliroh, T. A. *Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais*. Mizan: 2022.
- Abidin, Zainal. "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Pluralitas." *Humaniora* 3, no. 2 (2012): 373. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3332>.
- Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2012.
- Fadhil, Musryid Al. "Analisis Konsep Triple Helix Dalam Mendorong Pengembangan Industri Kreatif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Firmansyah, Heri, dan Nur Fatimah. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Tabayyun : Journal Of Islamic*

- Studies* 1, no. 02 (2023).  
<https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/19>.
- Heryanto, Ariel. "Budaya populer di Indonesia." Yogyakarta: *Jalasutra*, 2012.
- Madung, Otto Gusti. "Filsafat Politik Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis." Penerbit Ledalero. Penerbit Ledalero, 2013.
- Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis. *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan*. News.Ge. Gramedia Pustaka Utama, 20189.
- Rohmah, A Nur, O M Hasim Harahap, dan T Agustian. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa ...." IAIN CURUP, 2022.